

**PENGARUH KOMPETENSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, KOMITMEN APARATUR DESA
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN TERHADAP PENGELOLAAN
KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN RANGSANG BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Kenari Purnama¹⁾, Enni Savitri²⁾, Julita²⁾

1) Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Dosen Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : kenaripurnama18@gmail.com

*Influence Of Competency, Utilization Of Information Technology, Government Internal
Control System, Village Apparature Commitment and Environmental Management Of The
Financial Management Of Village Funds
At Rangsang Barat Sub-District, Kepulauan Meranti Regency*

ABSTRACT

This study aims to analyze the Competence, Utilization of Information Technology, Government Internal Control Systems, Village Apparatus Commitment and Environmental Management to Village Fund Financial Management. The population of this research was 12 villages in West Rangsang sub-district. The selection of research samples using purposive sampling method. The sample in this study was the village head, the village secretary, the head of financial affairs, the head of administrative and planning affairs, as well as the village consultative body with 60 respondents. The data analysis used is multiple regression analysis. The results showed that the Competence, Utilization of Information Technology, Government Internal Control Systems and Environmental Management influenced the Village Fund Financial Management. Meanwhile, Village Apparatus Commitment has no effect on Village Fund Financial Management.

Keywords: Village Fund Management, Competence, Utilization of Information Technology, SPIP, Commitment, Environmental Management

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam hal memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat hingga kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah pusat untuk menunjang pembangunan di desa adalah Dana Desa (DD), yaitu dana yang diberikan kepada desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditransfer melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Bantuan Dana Desa (DD) merupakan dana bantuan langsung yang diperuntukkan bagi desa untuk prioritas pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Elfinet al. 2019). Undang Undang tersebut telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya yang dimiliki termasuk merencanakan pembangunan desa serta mengelola keuangan dan kekayaan milik desa yang terangkum dalam suatu siklus pengelolaan keuangan desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

pertanggungjawaban keuangan desa. (BPKP, 2016)

Perkembangan dana desa semakin lama semakin besar. Tahun 2015 total dana desa mencapai Rp20 triliun, dan 2019 menjadi Rp75 triliun dengan jumlah 75 ribu desa di Indonesia. Pengalokasian dana desa sebanyak 77% alokasi dasar (dibagi rata), 20% formula (jumlah penduduk, kemiskinan, wilayah kabupaten/kota dan geografis), dan 3% afirmasi (desa tertinggal). Dan masih belum mendorong pemerataan. Dalam pengelolaan dana desa terdapat pendamping desa dengan jumlahnya mencapai 40 ribu orang yang tugasnya mendampingi desa dalam perencanaan dan pertanggungjawaban. Namun masih banyak permasalahan pendamping desa karena tidak ada standar kompetensi. Melainkan hanya tercatat nama sedangkan partisipasi di desa kurang. (KPK, 2019)

Tabel 1 Data Rekapitulasi Dana Desa Kecamatan Rangsang Barat

Nama Desa	2016	
	Penyaluran DD	Realisasi
Desa Bantar	693.938.000	693.938.000
Desa Anak Setatah	668.683.000	668.683.000
Desa Telaga Baru	669.441.000	660.941.000
Desa Segomeng	647.782.000	647.782.000
Desa Melai	667.636.000	667.636.000
Desa Sungai Cina	669.944.000	663.694.000
Desa Bokor	715.887.000	707.383.000
Desa Lemang	658.694.000	658.693.880
Desa Sialang Pasung	720.725.000	720.725.000
Desa Bina Maju	666.066.000	602.716.000
Desa Permai	637.193.000	637.193.000
Desa Mekar Baru	643.867.000	635.367.000

Sumber : Data DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2016

Tabel 2 Data Rekapitulasi Dana Desa Kecamatan Rangsang Barat

Nama Desa	2017	
	Penyaluran DD	Penyaluran DD
Desa Bantar	877.222.000	877.222.000
Desa Anak Setatah	846.360.000	846.360.000
Desa Telaga Baru	847.287.000	847.287.000
Desa Segomeng	820.819.000	820.819.000
Desa Melai	845.080.000	845.080.000
Desa Sungai Cina	847.901.000	847.901.000
Desa Bokor	904.044.000	904.044.000
Desa Lemang	834.153.000	834.153.000
Desa Sialang Pasung	909.956.000	909.956.000
Desa Bina Maju	843.162.000	843.162.000
Desa Permai	807.879.000	807.879.000
Desa Mekar Baru	816.036.000	816.036.000

Sumber : Data DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2017

Tabel 3 Data Rekapitulasi Dana Desa Kecamatan Rangsang Barat

Nama Desa	2018	
	Penyaluran DD	Penyaluran DD
Desa Bantar	732.076.000	732.076.000
Desa Anak Setatah	974.133.000	974.133.000
Desa Telaga Baru	742.089.000	742.089.000
Desa Segomeng	729.381.000	729.381.000
Desa Melai	724.374.000	724.374.000
Desa Sungai Cina	734.445.000	734.445.000
Desa Bokor	1.096.715.000	1.096.715.000
Desa Lemang	725.047.000	725.047.000
Desa Sialang Pasung	803.928.000	803.928.000
Desa Bina Maju	752.568.000	752.568.000
Desa Permai	737.540.000	737.540.000
Desa Mekar Baru	762.433.000	762.433.000

Sumber : Data DPMD Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

Berdasarkan tabel rekapitulasi dana desa diatas menggambarkan bahwa dana desa untuk kecamatan rangsang barat yang terealisasi dari tahun 2016 sebesar 98%, sedangkan pada tahun 2017 turun menjadi 59%, kemudian pada tahun 2018 menjadi 89% dan masih ada desa yang tergolong rendah dalam realisasi dana desa dibandingkan dengan tahun 2016.

Dari rincian diatas dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan dana yang disalurkan ke desa tidak hanya sekedar penerimaan penyaluran anggaran, namun juga bentuk penerimaan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta memenuhi kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan penyempurnaan formula pengalokasian, pemberian tanggungjawab pada pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan kualitas pengelolaan dana desa serta pertajaman prioritas penggunaan dana untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencapaian kualitas hidup masyarakat untuk mengurangi kesenjangan penyediaan infrastruktur dan memperluas kesempatan kerja (Kemenkeu, 2017). Sehingga aparatur desa dituntut untuk dapat memahami dan mengelola

keuangan dana desa dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beda penelitian ini dengan penelitian (Elfin et al. 2019) adalah menambahkan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Pengelolaan Lingkungan sebagai variabel independen. Selain itu, peneliti mengambil tempat yang berbeda pula yakni desa-desa yang ada di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Alasan peneliti menambahkan Pemanfaatan Teknologi Informasi, karena membantu aparat desa dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga mudah untuk menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (Perdana, 2018); Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki peran penting dalam pengawalan pengelolaan dana desa (Yudianto dan Sugiarti, 2017); Pengelolaan Lingkungan perlu diperhatikan pemeliharannya yang didukung dan dilengkapi oleh dana desa yang ditransfer oleh pemerintah, dirancang untuk dapat mendukung masyarakat dalam konservasi dan rehabilitasi hutan di Indonesia (Wattset al. 2019).

LANDASAN TEORI

Teori *stewardship*

Teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya (Donaldson dan Davis, 1991).

Teori penetapan tujuan

Teori penetapan tujuan merupakan salah satu bagian dari teori motivasi, teori ini memaparkan bahwa tindakan individu dikendalikan oleh ide pemikiran dan niat yang ada dalam diri individu tersebut (Locke dan Lathan, 1990). Teori ini menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan kinerja. Teori ini juga menunjukkan pemahaman seseorang terhadap tujuan organisasi dan akan mempengaruhi perilaku dalam bekerja

Pengelolaan keuangan dana desa (Y)

Dana Desa merupakan suatu bentuk upaya untuk kesejahteraan masyarakat dengan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa baik dalam rangka memperkuat penciptaan lapangan kerja, mengatasi kesenjangan, dan pengentasan angka kemiskinan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Kemenkeu, 2017).

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Selanjutnya pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) yaitu perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan kepala desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

Pada tahap perencanaan, perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDDesa. Sekretaris desa mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan, kemudian disampaikan kepada kepala desa. Rancangan peraturan desa terkait APBDDesa disampaikan oleh kepala desa kepada

Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati paling lambat bulan oktober tahun berjalan. (Permendagri No 20 Tahun 2018)

Pada tahap pelaksanaan, pelaksanaan didefinisikan sebagai implementasi dari kegiatan-kegiatan yang merujuk pada pedoman yang telah diatur sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Implementasi tersebut merupakan pelaksanaan kegiatan yang merujuk pada pedoman yang telah disusun. (Akram dan Pituringsih, 2017)

Pada tahap penatausahaan, penatausahaan penerimaan desa dianggap sah ketika disetor dan telah masuk ke rekening desa dan didukung oleh bukti yang sah untuk transfer dilengkapi dengan nota kredit, sedangkan PADesa disertai dengan Surat Tanda Setoran. Penerimaan desa yang disetor dilakukan dengan cara menyetor langsung ke bank oleh pihak ketiga, menyetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan atau kantor pos oleh pihak ketiga dan disetor melalui bendahara oleh pihak ketiga. Setoran pendapatan melalui bendahara harus dilaksanakan selambat-lambatnya satu hari kerja kecuali desa tidak memiliki layanan perbankan. (Perbup Nomor 6 Tahun 2017)

Pada tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan tersebut terdiri atas laporan pelaksanaan APBDesa dan laporan realisasi kegiatan. Kepala desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Selanjutnya Bupati/Walikota menyampaikan laporan konsolidasi pelaksanaan APB Desa kepada menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa paling lambat minggu kedua bulan agustus tahun berjalan. (IAI-KASP 2015)

Pada tahap akhir yaitu pertanggungjawaban bahwa kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban tersebut disampaikan paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APBDesa dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke desa. (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018)

Kompetensi (X1)

Kompetensi adalah suatu kemampuan yang dilandasi oleh keterampilan dan pengetahuan yang didukung oleh sikap kerja serta penerapannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan ditempat kerja yang mengacu pada persyaratan kerja yang ditetapkan (Sutrisno, 2011 : 203).

Pemanfaatan Teknologi informasi (X2)

Teknologi informasi dipakai untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Teknologi ini menggunakan seperangkat komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan dan digunakan agar dapat disebar dan diakses secara global (Nasir et al. 2013 : 20).

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mendefinisikan sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan

keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Komitmen Aparatur Desa (X4)

Komitmen aparatur desa adalah sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi, dengan cara tetap bertahan dalam organisasi, membantu mencapai tujuan organisasi dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan alasan apapun. (Yusuf dan Syarif, 2018)

Pengelolaan lingkungan (X5)

Dalam Undang – Undang No 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Kompetensi (X1) terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan prinsip umum pengelolaan dana desa dengan memperhatikan dana yang diatur secara rapi, terpercaya dihadapan hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta bermanfaat bagi masyarakat pedesaan. Dibutuhkan suatu pelatihan dan bimbingan bagi aparatur desa, serta pengawasan dan rekomendasi yang diberikan oleh inspektorat. Karena dana desa harus dikelola oleh aparatur yang memiliki pemahaman, pendidikan ataupun berkompeten (Savitri et al. 2019). Sesuai dengan teori *Stewardship*,

yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa merupakan suatu tanggung jawab yang besar dan harus dijalankan oleh aparatur desa yang memiliki standar integritas, dapat dipercaya, bertanggungjawab atas tindakannya, dan kompeten dalam mengelola dana desa.

Hasil penelitian (Atmadja dan Saputra, 2017) menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan dana desa..

H1 : Kompetensi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)

Pemerintah desa harus menggunakan teknologi tata kelola elektronik untuk melakukan inovasi dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa agar transparan dan akuntabel. Hal ini berarti pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola dana desa sangat dibutuhkan (Fikri et al. 2018). Sesuai dengan teori *Stewardship*, yang menunjukkan adanya hubungan dari pemanfaatan teknologi informasi dengan pengelolaan dana desa. Karena teknologi informasi yang digunakan harus memiliki sistem integritas dan memudahkan aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hasil penelitian (Maulana, 2018) menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H2 : Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengaruh SPIP (X3) terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)

Implementasi dari sistem pengendalian internal akan mempengaruhi tata kelola dana desa yang baik, karena adanya hubungan

antara penerapan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan dalam mengelola dana desa (Taufik, 2019). Berdasarkan teori penetapan tujuan yaitu sistem pengendalian dilakukan untuk peningkatan dan pencapaian tujuan serta pencegahan terhadap tindakan kecurangan (Wardani dan Andriyani, 2017).

Hasil penelitian (Yudianto dan Sugiarti, 2017) dengan kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi pengelolaan keuangan dana desa karena pemerintah desa sangat perlu memperhatikan sistem pengendalian internal dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

H3 : SPIP Berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengaruh Komitmen Aparatur Desa (X4) terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)

Komitmen yang ada pada diri aparatur akan mendorong rasa percaya diri dan semangat kerja dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan yang lebih baik (Taufik, 2013). Hal ini sesuai dengan teori *Stewardship*, dimana aparatur pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik diperlukan suatu komitmen (Perdana, 2017). Komitmen dapat menjadi dorongan bagi aparatur untuk suatu keharusan dirinya ikut terlibat dalam mengelola dana desa.

Hasil penelitian (Elfin et al. 2019) bahwa komitmen mempunyai pengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dengan adanya seluruh aparatur yang terkait dengan pengelolaan harus memiliki komitmen yang kuat demi tercapainya kesejahteraan desa melalui pengelolaan dana desa.

H4 : Komitmen Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengaruh Pengelolaan Lingkungan (X5) terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)

Potensi dana desa sangat dibutuhkan untuk pengelolaan lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan teori penetapan tujuan, dikarenakan salah satu arah dari pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ialah dukungan untuk pengelolaan pelestarian lingkungan hidup yang menjadi prioritas dalam dana desa (Wattset al. 2019). Pemanfaatan anggaran untuk pengelolaan lingkungan sangat perlu diperhatikan untuk melindungi hutan sekaligus menghindarkan masyarakat dari potensi krisis sumber daya air dan pangan serta menghindari masyarakat dari bencana ekologis.

Hasil penelitian (Hidayat, 2016) bahwa lingkungan membutuhkan dana transfer desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, sehingga sikap kepedulian dalam pengelolaan lingkungan berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

H4 : Pengelolaan Lingkungan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

METODE PENELITIAN

Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan pada desa – desa di Kecamatan Rangsang Barat yang merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, Indonesia.

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah kecamatan rangsang barat yang terdiri atas 12 desa. Sedangkan Sampel adalah bagian dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Pengelolaan Keuangan Dana Desa (Y)

Pengelolaan Keuangan Dana Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban keuangan Desa (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018). Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pelaksanaan
- c. Penatausahaan
- d. Pelaporan
- e. Pertanggungjawaban

Kompetensi (X1)

Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai tugas dan fungsi jabatan. Definisi dari kompetensi dirumuskan dalam kamus kompetensi manajerial yaitu kompetensi adalah kemampuan berpikir, mengelola diri, mengelola orang lain, mengelola tugas, mengelola sosial dan budaya (Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013). Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a. Pengetahuan
- b. Keahlian
- c. Perilaku

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan dan memanipulasi data dalam berbagai cara. Teknologi informasi dipakai untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu (Kasemin, 2015). Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a. Komputer
- b. Jaringan Internet

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No 60 Tahun 2008). Adapun indikatornya sebagai berikut:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian resiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian

Komitmen Aparatur Desa (Variabel Independen : X4)

Komitmen adalah sikap loyalitas karyawan terhadap organisasi, dengan cara tetap bertahan dalam organisasi, membantu mencapai tujuan organisasi dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi dan tidak memiliki keinginan untuk meninggalkan organisasi dengan alasan apapun (Yusuf dan Syarif, 2018). Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a. Komitmen afektif
- b. Komitmen kontinyu
- c. Komitmen normatif

Pengelolaan Lingkungan (Variabel Independen : X5)

Pengelolaan lingkungan adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian, pengawasan dan penegakan hukum (Undang Undang No 32 Tahun 2009). Adapun indikatornya sebagai berikut :

- a. Perencanaan
- b. Pemanfaatan

- c. Pemeliharaan
- d. Pengendalian
- e. Pengawasan
- f. Penegakan Hukum

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengelolaan Keuangan Dana Desa	60	3	5	4,82	0,285
Kompetensi Pemanfaatan TI	60	3	5	4,69	0,446
SPI Pemerintah	60	3	5	4,64	0,450
Komitmen Aparatur Desa	60	2	5	4,52	0,535
Pengelolaan Lingkungan Valid (listwise)	60	3	5	4,54	0,411

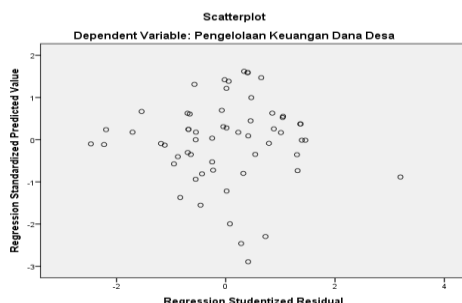
Sumber : Data Olahan, 2020

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar1 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, dan tersebar di atas dan di bawah angka 0. Jadi, dapat dikatakan bahwa model

regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas Data One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Kompetensi	Pemanfaatan TI	SPI Pemerintah	Komitmen Aparatur Desa	Pengelolaan Lingkungan
N		60	60	60	60	60	60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	100,47	25,75	31,33	75,75	21,92	70,07
	Std. Deviation	5,939	2,412	2,341	6,839	2,227	6,896
Most Extreme Differences	Absolute	,102	,108	,093	,100	,098	,096
	Positive	,087	,059	,090	,088	,085	,075
	Negative	-,102	-,108	-,093	-,100	-,098	-,096
Test Statistic		,102	,108	,093	,100	,098	,096
Asymp. Sig. (2-tailed)		,194 ^c	,079 ^c	,200 ^d	,200 ^d	,200 ^d	,200 ^d

Sumber: Data Olahan, 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) yang dihasilkan lebih besar dari 0.05, maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi (X1)	0,350	2,860	Bebas Multikolineritas
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,210	4,759	Bebas Multikolineritas
SPIP (X3)	0,200	4,933	Bebas Multikolineritas
Komitmen Aparatur Desa (X4)	0,958	1,044	Bebas Multikolineritas
Pengelolaan Lingkungan (X5)	0,393	2,547	Bebas Multikolineritas

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan perhitungan analisis data diatas, diperoleh nilai *tollerance* untuk seluruh variabel independen > 0,10 dan VIF < 10. Jadi, dapat disimpulkan keseluruhan variabel independen maupun dependen bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 7 Hasil Uji Autokorelasi

Durbin Watson		Keterangan
1,356	0	Tidak terdapat Autokorelasi

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Lingkungan, Komitmen Aparatur Desa, Kompetensi, Pemanfaatan TI, SPI Pemerintah

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa
Sumber : Data Olahan (2020)

Berdasarkan hasil uji autokorelasi tersebut nilai *Durbin-Watson* berada antara -2 sampai dengan +2, yaitu 1,356 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak terdapat Autokorelasi.

Hasil Pengujian Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Berdasarkan hasil olahan data Uji Validitas, didapatkan hasil bahwa keseluruhan nilai *r* tabel pada masing-masing variabel lebih kecil daripada *r* hitung. Sehingga bisa dikatakan valid

Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil olah data, nilai *Cronbach Alpha* dari keseluruhan variabel dependen dan independen penelitian ini menunjukkan *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan semua instrumen dalam penelitian ini dikatakan reliabel.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27,556	4,478		6,154	,000
Kompetensi	,524	,198	,213	2,641	,011
Pemanfaatan TI	1,039	,264	,409	3,939	,000
SPI Pemerintah	,207	,092	,238	2,238	,029
Komitmen Aparatur Desa	,071	,130	,027	,550	,584
Pengelolaan Lingkungan	,137	,065	,160	2,100	,040

a. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas maka didapat persamaan regresi bergandanya adalah sebagai berikut.

$$Y = 27,556 + 0,524X_1 + 1,039 X_2 + 0,207X_3 + 0,071X_4 + 0,137X_5 + e$$

Keterangan angka-angka dalam persamaan regresi diatas :

- Nilai konstanta (a) sebesar 27,556. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel bebas tidak berpengaruh, maka besarnya pengelolaan keuangan dana desa adalah 27,556.

- Nilai koefisien regresi variabel kompetensi sebesar 0,524. Artinya adalah bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kompetensi akan meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa sebesar 0,524 dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 1,039. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan satu satuan variabel pemanfaatan teknologi informasi akan meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa sebesar 1,039 dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,207. Artinya adalah bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sistem pengendalian intern pemerintah akan meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa sebesar 0,207 dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstan.
- Nilai koefisien regresi variabel komitmen aparatur desa sebesar 0,071. Artinya adalah bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel komitmen aparatur desa akan meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa sebesar 0,071 dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstan
- Nilai koefisien regresi variabel pengelolaan lingkungan sebesar 0,137. Artinya bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengelolaan lingkungan akan meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa sebesar 0,137 dengan asumsi faktor-faktor lainnya konstan.
- Standar eror (e) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap Y

tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R²)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,937 ^a	,877	,866	2,174

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Lingkungan, Komitmen Aparatur Desa, Kompetensi, Pemanfaatan TI, SPI Pemerintah

b. Dependent Variable: Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Sumber : Data Olahan 2020

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh nilai R² (R Square) sebesar 0,877 atau 87,7 %. Hal ini menunjukan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen (kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen aparatur desa dan pengelolaan lingkungan) terhadap variabel dependen (pengelolaan keuangan dana desa) sebesar 87,7% atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (kompetensi, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, komitmen aparatur desa dan pengelolaan lingkungan) mampu menjelaskan 87,7% variabel dependen. Sedangkan sebesar 12,3 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kompetensi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Dengan diterima hipotesis ini membuktikan bahwa kompetensi aparatur desa merupakan faktor penting dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa untuk menghasilkan pengelolaan keuangan dana desa yang baik. Sesuai dengan teori

Stewardship, pengelolaan keuangan dana desa merupakan suatu tanggungjawab yang besar dan harus dijalankan oleh aparatur yang memiliki standar integritas, dapat dipercaya, bertanggungjawab atas tindakannya, dan kompeten karena berkaitan dengan tindakan yang lebih ditujukan pada sasaran hasil utama dalam pengelolaan keuangan dana desa. Sejalan dengan pernyataan (Savitri et al. 2019) yaitu dalam pengelolaan keuangan dana desa harus sesuai dengan prinsip umum seperti memperhatikan dana yang diatur secara rapi, terpercaya dihadapan hukum, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bermanfaat bagi masyarakat desa. Karena dana desa harus dikelola oleh aparatur yang memiliki pemahaman, keahlian ataupun berkompeten.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Umar et al. 2018), (Indrajaya, 2017) dan (Atmadja dan Saputra, 2017) yang menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Djarmiko et al. 2019), (Perdana, 2018) dan (Elfin. 2019) ditemukan bahwa variabel kompetensi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Diterimanya pemanfaatan teknologi informasi membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor penting dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah desa untuk menghasilkan pengelolaan keuangan dana desa yang baik. Sesuai dengan teori *Stewardship*, yang menunjukkan adanya hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan pengelolaan keuangan dana desa yaitu teknologi informasi yang digunakan harus memiliki standar integritas untuk mendorong aparatur bersikap jujur dan bertanggungjawab

kepada semua pihak dan memudahkan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan pernyataan (Fikri et al. 2018), desa memiliki hak untuk mengelola pemerintahan, layanan dan manajemen keuangan. Jumlah dana desa yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat bisa menyebabkan penyalahgunaan, untuk itu pemerintah desa harus menggunakan teknologi tata kelola elektronik untuk melakukan inovasi dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa agar transparan dan akuntabel.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Resfiana dan Syamsir, 2019), (Sapartiningsih et al. 2018) dan (Maulana, 2018) bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi (PTI) berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. karena memberikan manfaat kepada organisasi dalam mengelola anggaran. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Marlinawati dan Wardani, 2018), (Suherwan dan Kamaliyah, 2017) bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Dengan diterima sistem pengendalian internal membuktikan bahwa pengelolaan keuangan dana desa membutuhkan perilaku dan norma yang baik dari setiap aparat dan memberikan keteladanan dalam pelaksanaan peraturan yang berlaku. Berdasarkan teori penetapan tujuan atau *Goal Setting Theory*, yaitu sistem pengendalian internal dilakukan untuk peningkatan dan pencapaian tujuan serta pencegahan tindakan kecurangan. Sejalan dengan pernyataan (Taufik, 2019) bahwa implementasi sistem pengendalian internal pemerintah mampu mempengaruhi pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Implementasi ini akan

mempengaruhi tata kelola dana desa yang baik, Oleh karena itu sangat dibutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang mendukung untuk melihat titik kritis yang akan muncul dalam pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yudianto dan Sugiarti, 2017), (Atmadja dan Saputra, 2017) dan (Aziz dan Prastiti, 2019) menyatakan bahwa SPIP memiliki peran penting dalam pengawalan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa. Namun berbeda dengan hasil Penelitian (Mutmainnah dan Pramuka, 2017) dan (Hindriani et al. 2012) Sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.

Komitmen Aparatur Desa tidak Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan keuangan dana desa tidak hanya menyangkut perlunya peraturan pendukung dan sarana-prasarana, namun yang paling penting adalah dimilikinya aparat desa yang memiliki komitmen yang dapat diandalkan. Berdasarkan teori *Stewardship*, aparat pengelola dana desa harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap organisasi untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Perdana, 2018). Dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang baik diperlukan suatu komitmen, karena dapat menjadi dorongan bagi aparat untuk suatu keharusan dirinya ikut terlibat dalam mengelola dana desa. Berdasarkan pernyataan (Baihaqi dan Damayanti, 2016) hal tersebut belum menggambarkan tindakan yang jelas dalam mencapai tujuan organisasi dan juga aparat desa perlu dukungan dan kepercayaan dari organisasi baik dalam bentuk penghargaan ataupun *reward*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Perdana, 2018), (Baihaqi dan Damayanti, 2016) dan

(Hasnita et al. 2019) bahwa variabel komitmen tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Berbeda dengan hasil penelitian (Ladapase, 2019), (Mada et al. 2017) dan (Elfin et al. 2019) bahwa komitmen berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa, dengan adanya komitmen aparatur diharapkan dapat memiliki pandangan positif serta berusaha berbuat yang terbaik untuk mencapai tujuan.

Pengelolaan Lingkungan Berpengaruh Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Diterimanya pengelolaan lingkungan terhadap pengelolaan keuangan dana desa membuktikan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang baik serta fungsi pelestarian lingkungan yang terpenuhi akan memicu pengelolaan keuangan dana desa yang baik juga. Sejalan dengan teori penetapan tujuan dikarenakan salah satu arah dari pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa ialah dukungan untuk pengelolaan pelestarian lingkungan hidup yang menjadi prioritas dalam dana desa. Sejalan dengan pernyataan (Watts et al. 2019) Pemanfaatan anggaran untuk pengelolaan lingkungan sangat perlu diperhatikan untuk melindungi hutan sekaligus menghindarkan masyarakat dari potensi krisis sumber daya air dan pangan serta menghindarkan masyarakat dari bencana ekologis.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Hidayat, 2016), (Millati, 2016) dan (Watts et al. 2019) bahwa variabel pengelolaan lingkungan memberikan pengaruh positif karena lingkungan membutuhkan dana transfer desa yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Namun berbeda dengan hasil penelitian (Yuliantini et al. 2017) dan (Adnyana et al. 2017) yang menyatakan bahwa lingkungan tidak mendapatkan perlakuan khusus dalam dana desa sehingga pengelolaan lingkungan tidak

bisa dikatakan berpengaruh positif dalam pengelolaan dana desa.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Kompetensi yang dimiliki aparatur desa berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Komitmen aparatur desa tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa. Pengelolaan lingkungan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan dana desa.

Keterbatasan

Beberapa responden meminta kuisisioner untuk ditinggalkan dan saat diwawancara responden meminta responden lain untuk mewakili sehingga penulis tidak dapat mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya. Hasil penelitian ini hanya dapat digeneralisasi pada pengelolaan keuangan dana desa pada perangkat desa di seluruh desa di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga tidak dapat digeneralisasi pada perangkat desa selain dari kecamatan tersebut.

Saran

Bagi aparatur desa Kecamatan Rangsang Barat dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu literatur dan sumber informasi dalam rangka evaluasi di organisasinya masing-masing guna meningkatkan pengelolaan keuangan dana desa. Bagi peneliti selanjutnya, dapat melanjutkan metode wawancara secara efektif. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat

menggunakan variabel lain yang mungkin lebih dapat menjelaskan mengenai pengelolaan keuangan dana desa atau menambahkan variabel moderasi ataupun mediasi. Bagi regulator, dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai literatur atau bahan pertimbangan untuk mengembangkan kebijakan, maupun peraturan perundang-undangan terkait dengan objek dan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, Atmadja, dan Herawati, 2017. *Analisis pengaruh akuntansi lingkungan pada BUMDES Untuk Mewujudkan Green Accounting: Studi pada BUMDES Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*), e-Journal UNDIKSA, Vol. 8, No. 2, pp 1-11,
- Atmadja dan Komang Adi Kurniawan Saputra, 2017. *Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Buleleng)*, Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol.12, No. 1, pp 7-16
- Baihaqi dan Damayanti, 2016. *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal EMB, Vol.15, No.4, pp 1-13,
- BPKP, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*
- DPMD, 2016-2018. *Data Rekapitulasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Meranti*
- DJatmiko, Prawoto, Astuti dan Wulandari, 2019. *The Effect of Human Resources, Internal Control Systems, And Implementation Effectiveness of Village Financial Systems on Village Financial Statement Quality (Survey on Entire Village in Bantul District)*, MECJ, Vol.3, No. 1, pp 23-40,
- Elfin, Wawo dan Husin, 2019. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen pada tugas dan Regulasi Terhadap Pengelolaan keuangan Desa di Kabupaten Bombana*, JPEP, Vol.4, No.1, pp 68-79,
- Fikri, Suharto and Nugroho, 2018. *Utilization of Elektronik Government in Realizing Transparency and Accountability of Village Government: Synergy of Implementation of Electronic Village Budgeting and Electronic Monitoring Systems by Banyuwangi Government*, IJMMU, Vol.5, No.4, pp 453-469,
- Hasnita, Akib, Ernawati and Rosnawintang, 2019. *An Analysis Of Village Financial Management : The Importance Competencies and Commitment To Ask in Kabupaten Konawe Selatan*, Vol. 8, No. 2, pp 71-87,
- Hidayat, 2016. *Studi Tentang Pengaruh Kepedulian Lingkungan, Perilaku Konservasi, Dan Perilaku Pembelian Hijau Terhadap Sikap Skeptis Pada Iklan Hijau*, Vol.1, No 30,
- Hindriani, Hanafi, dan Domai, 2012. *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dalam*

- Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran di Daerah (Studi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun), Vol. 15, No. 3, pp 1-9,
- IAI-KASP, 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*
- Indrajaya, 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa dan Implementasi Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Dana Desa*
- Kasemin, Kasiyanto, 2015. *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*, PRENADAMEDIA GROUP : Jakarta
- Ladapase, Lalita Ivana Maria, 2019. *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Motivasi Aparatur, dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten*, Vol. 7, No. 18, pp
- Marlinawati dan Dewi Kusuma Wardani, 2018. *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa*, Jurnal Kajian Bisnis, Vol.26, No.2, pp 131-143,
- Mada, Sarifudin, Lintje Kalangi,dan Hendrik Gamaliel, 2017. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo*, Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis : Universitas Sam Ratulangi
- Maulana, 2018. *Aplikasi Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kota Batam*, Jurnal TIK Digital zone, Vol. 9, No. 2, pp 140-149
- Millati, 2016. *Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Lingkungan Daerah Wisata Gunung Ijen Kabupaten Banyuwangi*, JRABA, Vol. 1, No. 1, pp 85-96
- Mutmainnah, Ina dan Bambang Agus Pramuka, 2017. *Penerapan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan*, JEBA, Vol.19, No.04, pp 7-12,
- Perdana, Khaeril Wahyu, 2018. *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bantul*, Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Vol. 10, No. 24, pp 1-23,
- Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negeri Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Resfiana, 2019. *Pengaruh Penerapan Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Apratur Nagari Dalam Pengelolaan Keuangan Nagari*, Journal Of Education On Social Science, Vol. 3,
- Sapartiningsih, Suharno dan Kristianto, 2018. *Analisis Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Inormasi, Partisipasi Anggaran dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*, JA&STI, Vol.14, No. 1,pp 100-114,
- Savitri Enni, Andreas and Diyanto, 2019. *Accountability of Village Funds Management*, JAM, Vol.17, No.3, pp 515-521,
- Suherwan dan Kamaliah, 2017. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Alokasi Dana Desa di Kecamatan Siantan Selatan Kabupaten Kepulauan Anambas*, JTMB, Vol. 9, No. 2, pp
- Sutrisno, Edy, 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Kencana : Jakarta
- Taufik, 2019. *The Effect Of Internal Control Systems Implementation In Realizing Good Governance And It Impact On Fraud Prevention*, International Journal Of Scientific& Technology Research, Vol.8, No.9,
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Umar, Usman, Purba, 2018. *The Influence Of Internal Control and Competence of Human Resources on Village Fund Management and the Implications on the Quality Of Village Financial Reports*, IJCIET, Vol.9, No. 7, pp 1523-1531
- Wardani dan Andriyani, 2017. *Pengaruh Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan SPIP Teradap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa*, Jurnal Akuntansi, Vol.5, No.2, pp 88-98,
- Yudianto, Ivan dan Ekasari Sugiarti, 2017. *Pengaruh Penerapan SPIP Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (di Kabupaten Karawang)*, JAK, Vol. 17, No. 1, PP 9-18;
- Yusuf , Ria Mardiana dan Darman Syarif, 2018. *KOMITMEN ORGANISASI*, Penerbit Nas Media Pustaka, Makasar
- Yuliantini PA, Purnamawati, dan Herawati, 2017. *Analisis pengaruh akuntansi lingkungan pada Tempat Pengelolaan Sampah : Studi pada BUMDES Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng*, e-Jurnal Program Akuntansi, Vol.7, No.1